

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank Dunia telah lama mempublikasikan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong yang sangat kuat dalam pembangunan ekonomi daripada suatu negara. Hal tersebut didukung kuat oleh beberapa faktor, dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam menurunkan angka jumlah pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, dapat dengan mudah beradaptasi pada pasang surut dan arah permintaan pasar yang semakin tinggi. Dimana, potensi-potensi yang ada telah berfondasikan pada jumlah UMKM yang sangat besar dan memungkinkan unit usaha yang ada tersebar luas secara bidang usaha maupun geografis. Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia untuk tahun 2009, 99% dari 52,7 juta unit usaha di Indonesia merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Potensi-potensi yang ada dalam UMKM ini memberikan motivasi bagi pihak-pihak lain untuk melaksanakan program-program pemberdayaan UMKM. Dengan adanya program-program pemberdayaan UMKM yang akan dijalankan tersebut, maka dapat membantu penurunan angka kemiskinan hingga penurunan jumlah pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Aktivitas-aktivitas

pemberdayaan UMKM yang telah terealisasi antara lain dirumuskannya Undang-undang No. 9 Tahun 1995 pasal 5 tentang meningkatkan peran usaha kecil dalam perekonomian nasional oleh pemerintah, dikembangkannya Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil (PKPK) oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, serta dibentuknya Klinik Usaha Kecil dan Koperasi (KUKK) oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk mengembangkan pengaturan administrasi yang baik.

Tak dapat dipungkiri juga bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan tidaklah lepas dari masalah-masalah internal maupun eksternal pada UMKM yang menjadi faktor penghambat utama perkembangan ataupun kemajuan unit usaha. Masalah internal meliputi masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kemampuan UMKM dalam menggunakan teknologi dan mengelola modal, serta yang terpenting adalah akses UMKM dalam sumber daya produktif khususnya sumber daya pembiayaan yang berasal dari perbankan. Sedangkan, masalah eksternal yang ada meliputi, kurangnya institusi yang membidangi UMKM maupun peraturan-peraturan pemerintah daerah yang kurang kondusif bagi perkembangan UMKM.

Beberapa penelitian lain mengungkapkan bahwa kelemahan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi merupakan salah satu alasan utama kegagalan perusahaan mikro, kecil dan menengah (Peterson, Kometsky & Ridgway, 1993; Monk, 2000, dalam Utami dan Aprilia, 2008). Kekurangan catatan akuntansi akan menimbulkan

masalah perpajakan atau institusi pemerintah lainnya, dan juga menyulitkan manajer perusahaan untuk mengukur prestasi perusahaan. Peminjaman dana yang berasal dari pihak lain, terutama pada sektor perbankan merupakan pendukung yang penting bagi perkembangan dan kelanjutan daripada unit-unit usaha dengan skala mikro, kecil dan menengah.

Keterbatasan UMKM akan kemampuan akuntansi dan keterbatasan kapasitas manajemen dapat menimbulkan salah satu masalah, yaitu terhambatnya akses pendanaan dari sektor perbankan atau institusi-institusi keuangan lainnya. Mayoritas usahawan dari skala mikro, kecil dan menengah ini sering mengalami kegagalan dikarenakan kurangnya pengalaman dalam berusaha, kurangnya kemampuan manajemen dan kurangnya kemampuan dalam tata kelola keuangan atau administrasi pula. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk yang lain.

Hal tersebut dapat menyebabkan kemunduran usaha mereka karena harus membayar tinggi atas bunga pinjaman yang diperoleh. Sehingga, dapat dikatakan aman jika mereka mendapatkan pinjaman kredit yang berasal dari instansi-instansi keuangan resmi seperti perbankan. Kebutuhan peminjaman dana dari instansi-instansi

keuangan terutama pada perbankan dapat memicu UMKM untuk memanfaatkan jasa-jasa audit, dimana hal tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan perbankan yang berlaku.

Jasa *nonassurance* merupakan pilihan yang tepat untuk para usahawan UMKM dalam mendapatkan informasi yang nantinya akan dibutuhkan berbagai pihak khususnya sektor perbankan dalam peminjaman dana. Dalam jasa *nonassurance* ini terdapat tiga jenis jasa yang dapat diberikan Kantor Akuntan Publik (KAP) pada klien-kliennya, meliputi, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa konsultasi manajemen dan jasa perpajakan. Namun, jasa *nonassurance* yang dapat diberikan oleh KAP terkait dengan permasalahan yang ada meliputi, jasa kompilasi laporan keuangan dan jasa konsultasi manajemen, dimana jasa kompilasi laporan keuangan merupakan jasa yang menyediakan informasi laporan keuangan sebagai representasi pihak manajemen perusahaan seperti pencatatan transaksi akuntansi bagi kliennya sampai dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan klien. Sedangkan, jasa konsultasi manajemen merupakan jasa yang meliputi pemberian nasihat dan bantuan teknis pada klien guna meningkatkan penggunaan kemampuan dan sumber daya mereka dalam mencapai tujuan dari perusahaan.

Jasa *nonassurance* memiliki tujuan untuk membantu meningkatkan dan juga mengembangkan kemampuan akuntansi serta kapasitas manajemen dari UMKM untuk menjadi lebih baik secara independen dan tidak bias. Pengambil keputusan dalam hal ini adalah instansi-instansi finansial memerlukan informasi sebagai dasar untuk

mengambil keputusan. Dalam jasa *nonassurance*, pemanfaatan jasa kompilasi laporan keuangan dari akuntan oleh UMKM dapat membantu UMKM dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan administrasi hingga perancangan sistem akuntansi yang baik bagi UMKM. Sedangkan, pemanfaatan jasa konsultasi manajemen dapat membantu mendeteksi yang terjadi dalam perusahaan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi pengukuran atau tindakan-tindakan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan sumber dayanya secara tepat dan efisien. Dengan demikian, UMKM dapat mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kelemahan-kelemahan yang berasal dari dalam (internal) UMKM yaitu, tepatnya pada keterbatasan kemampuan akuntansi dan kemampuan akan kapasitas manajemen akan dapat dimungkinkan untuk ditangani secara baik dan efektif dengan adanya campur tangan dari pihak yang profesional, dalam hal ini adalah profesi akuntan publik. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas akan adanya potensi pemberian jasa *nonassurance* yang dilakukan oleh akuntan publik bagi UMKM.

Dalam hal ini, UMKM usaha kerajinan binaan Dinas Koperasi, UMKM provinsi Jatim di Surabaya yang akan menjadi obyek penelitian. Dapat dikatakan bahwa usaha kerajinan telah menjadi salah satu daya tarik dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, dimana usaha kerajinan ini selain berada dalam cakupan

regional dan nasional juga diekspor ke negara-negara tetangga hingga negara lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini diadakan untuk mengetahui potensi pemberian atau penyelenggaraan jasa *nonassurance* bagi UMKM usaha kerajinan binaan Dinas Koperasi, UMKM provinsi Jatim di Surabaya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi penyelenggaraan jasa kompilasi laporan keuangan oleh akuntan publik bagi UMKM ?
2. Bagaimanakah potensi penyelenggaraan jasa konsultasi manajemen oleh akuntan publik bagi UMKM ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi penyelenggaraan jasa kompilasi laporan keuangan oleh akuntan publik bagi UMKM.
2. Untuk mengetahui potensi penyelenggaraan jasa konsultasi manajemen oleh akuntan publik bagi UMKM.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Aplikasi teori yang telah diperoleh dengan kondisi riil yang dialami oleh UMKM tentang penyelenggaraan jasa *nonassurance* dan menambah referensi maupun sebagai pembandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang sama.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Manajemen pada UKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran yang berkaitan dengan tingkat pemahaman UMKM atas adanya jasa *nonassurance*, khususnya pada jasa kompilasi dan jasa konsultasi manajemen.

#### 2. Praktisi akuntan professional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan potensi atas penyelenggaraan jasa *nonassurance* pada UMKM, serta memberikan gambaran informasi yang sesungguhnya dibutuhkan oleh pihak manajemen UMKM.

## **1.5 Sistematika Skripsi**

Untuk memudahkan pembahasan pada skripsi, maka penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat landasan teori yang diambil dari literatur-literatur terkait dengan penelitian terdahulu, teori yang akan dibahas, dan kerangka teoritis.

### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mencakup desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, teknis analisis data yang digunakan.

### **BAB 4: PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, pengolahan data, dan hasil dari pengolahan data serta jawaban atas analisis.

### **BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan intisari analisis dan pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini, dijelaskan pula keterbatasan dan perbaikan penelitian di masa depan.